

## **BAB II**

### **DASAR-DASAR POLITIK LUAR NEGERI RUSIA**

Dalam bab ini penulis akan membahas mengenai dasar-dasar politik luar negeri yang dimiliki oleh negara Rusia, mencakup sistem pemerintahan Rusia, Politik luar negeri Rusia, Politik luar negeri Rusia terhadap Timur Tengah, dan juga Politik luar negeri Rusia terhadap Suriah.

Rusia atau nama resmi negaranya adalah Rossiyskaya Federatsiya (Russian Federation) adalah Negara yang membentang dari Eropa Timur hingga Asia bagian Utara, Rusia sendiri merupakan Negara terbesar didunia yang luas wilayahnya mencapai 17.075.200 Km (tujuh belas juta tujuh puluh lima ribu dua ratus) kilometer persegi, bahkan luas tersebut hampir lebih dari dua kali lipat luas Negara Kanada yang menjadi Negara terbesar kedua di dunia.<sup>1</sup>

Rusia menjadi Negara independent pada tahun 1991 setelah runtuhnya Uni Soviet pasca perang dingin berakhir atau pasca Uni Soviet runtuh akibat kekalahan dalam Perang Dingin. Presiden pertama Rusia setelah lepasnya mereka dari Uni Soviet adalah Boris Yeltsin yang menjabat di tahun 1991, setelah itu dia di gantikan oleh Vladimir Putin yang terpilih sebagai Presiden Rusia pada tahun 2000 hingga 2004, presiden Vladimir Putin terpilih kembali pada pemilihan presiden tahun 2004. Namun

---

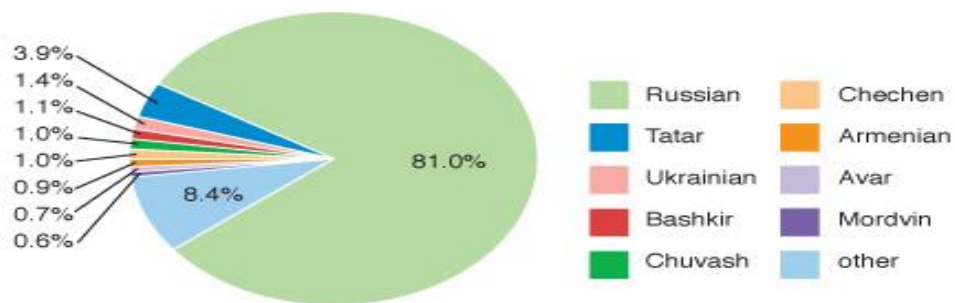
<sup>1</sup> "Russia", di akses dari <https://www.britannica.com/place/Russia>, pada tanggal 11 Januari 2017 pada pukul 14.30

pada tahun 2008 Vladimir Putin mengundurkan diri dan digantikan oleh suksesornya yaitu Dmitry Medvedev. Pada tahun 2012 Vladimir Putin terpilih kembali menjadi seorang Presiden dan masih menjabat hingga saat ini (2016).

Penduduk Rusia didominasi oleh etnis Rusia yang merupakan empat per-lima dari total penduduk yang mendiami Negara Rusia, namun di negara Rusia terdapat berbagai etnis selain etnis Rusia itu sendiri atau multi etnis. Kelompok-kelompok etnis ini terdiri dari beberapa kelompok etnis yang bersekala kecil yang bahkan tidak memiliki penduduk lebih dari satu juta, diantara lain etnis-etnis tersebut adalah Tatar, Ukraina, Chuvash, Bashkir, Chechen, dan Armenia. Keragaman masyarakat tercermin dalam 21 republik minoritas, 10 kabupaten otonom, dan daerah otonom yang ada di Federasi Rusia. Beberapa etnis lainnya dan gambaran seberapa banyak mereka di bandingkan dengan etnis Rusia dapat di lihat dalam bagan di bawah ini.<sup>2</sup>

**Gambar 2.1. Komparasi Penduduk Antar Etnik Di Russia**

**Ethnic composition (2010)**



© Encyclopædia Britannica, Inc.

<sup>2</sup> ibid

## **A. Sistem Pemerintahan Rusia**

Rusia adalah Negara yang berbentuk Presidensial Republik, sebelum menjadi Negara Independen dari Uni Soviet, rezim Soviet menguasai Rusia dan Eropa Timur dengan sistem Sosialis, dengan paham sosialis ini pemimpin pertama Uni Soviet pada saat itu yaitu Vladimir Lenin ingin membentuk Negara yang memiliki paham sosialis yang artinya tidak ada kepemilikan pribadi dan segala kegiatan ekonomi masyarakat di atur dan di awasi oleh pemerintah pusat, namun setelah runtuhnya Uni Soviet presiden pertama Rusia yaitu Boris Yelstin menginginkan Rusia yang lebih kearah demokrasi sehingga terbentuklah sistem Presidensial Republik.

Kekuasaan tertinggi dalam sistem Presidensial Republik di Rusia ada pada badan eksekutif yang di bagi menjadi dua badan yaitu Presiden dan Perdana Menteri namun dalam hal ini Presiden di Rusia memiliki kekuatan yang dominan di bandingkan dengan kekuatan Perdana Menteri, sedangkan Legislatif di waklili oleh Majelis Federal Rusia yang terbagi menjadi dua yaitu, State Duma (Negara Duma) sebagai majelis rendah dan Dewan Federasi sebagai majelis tinggi.<sup>3</sup>

Presiden adalah kepala Negara yang di pilih oleh rakyat setiap enam tahun sekali. Undang-undang pemilihan umum di Rusia memberikan syarat bahwa pemenang pemilu harus memiliki suara lebih dari 50%, jika tidak ada calon yang menerima lebih dari 50% suara maka 2 kandidat teratas yang mendapatkan banyak suara akan bertarung

---

<sup>3</sup> “Basic Fact About Russia : Political System” di akses dari <http://russiapedia.rt.com/basic-facts-about-russia/political-system/>, pada tanggal 11 Januari 2017 pada Pukul 16.00

dalam pemilihan kedua.<sup>4</sup> Sebelum di amandemen pada tahun 2008 konstitusi di Rusia hanya membatasi jabatan Presiden selama 4 tahun namun setelah adanya amandemen masa jabatan Presiden berubah menjadi 6 tahun dan paling lama menjabat selama 2 periode. Presiden pertama Rusia setelah merdeka dari Uni Soviet adalah Boris Yesltn, yang kedua adalah Vladimir Putin, ketiga adalah Dmitri Medvedev, dan semenjak tahun 2012 hingga 2018 Rusia di pimpin oleh Vladimir Putin.

Tugas Perdana menteri adalah sebagai kepala pemerintahan dan di pilih oleh Presiden atas persetujuan Parlemen sedangkan Presiden sebagai kepala Negara, berbeda dengan sistem parlementer lainnya di Rusia Presiden tetap memiliki kekuasaan penuh layaknya Presiden dalam sistem Presidensial dan di Rusia Presiden memimpin Negara bersama dengan Perdana Menteri.<sup>5</sup> Di Rusia kini ada 21 republik etnis, bersama 9 krai (wilayah), 46 *oblast* (daerah), tiga kota tingkat federal (Moskow, SaintPeterburg, dan Sevastopol), satu *oblast* otonom (Oblast Otonom Yahudi), dan empat *okrug* (distrik) otonom.<sup>6</sup>

Dalam sistem pemerintahan di Rusia terdapat dua badan legislatif yaitu majelis rendah dan majelis tinggi, majelis rendah adalah State Duma sedangkan majelis tinggi adalah Dewan Federasi.

---

<sup>4</sup> "A Short Guide to The Russian Political System", di akses dari <http://www.rogerdarlington.me.uk/Russianpoliticalsystem.html>, pada tanggal 11 Januari pukul 16.15

<sup>5</sup> *ibid*

<sup>6</sup> "kenapa ada banyak presiden di Rusia?" di akses dari [http://indonesia.rbth.com/politics/2014/01/13/kenapa\\_ada\\_banyak\\_presiden\\_di\\_rusia\\_23053](http://indonesia.rbth.com/politics/2014/01/13/kenapa_ada_banyak_presiden_di_rusia_23053), pada tanggal 11 Januari 2017 pukul 16.25

## 1. State Duma

State Duma adalah majelis rendah dalam parlemen di Rusia, State Duma memiliki anggota sebanyak 450 orang, di mana yang setengahnya (225 anggota) dipilih melalui sistem perwakilan proporsional berdasarkan partai politik peserta pemilu parlemen yang lolos batas minimal lima persen electoral treshold, dan setengahnya lagi (225 anggota) dipilih melalui single member konstituensi dengan basis simple majority pada saat berlangsungnya pemilu parlemen.<sup>7</sup>

State Duma sendiri berpusatkan di ibu kota Rusia yaitu di Moscow dan anggota State Duma sendiri di sebut sebagai Deputi. State Duma didirikan oleh Kaisar Tsar II pada tahun 1907 namun di hapuskan pada revolusi Rusia pada tahun 1917 dan di perkenalkan kembali di Rusia pada masa jabatan presiden pertama Rusia yaitu Borits Yeltsin pada tahun 1993 tepatnya pada tanggal 12 Desember 1993 bertepatan dengan di terapkanya konstitusi baru pasca runtuhnya Uni Soviet, State Duma sendiri di dirikan untuk jangka waktu 4 tahun dan presiden dapat menghentikan State Duma dengan syarat-syarat yang telah tertulis dalam konstitusi.

State Duma berhak membuat undang-undang federal, hukum konstitusi federal, dan amandemen konstitusi. Undang-undang dan hukum tersebut dapat berlaku setelah di setuju oleh Dewan Federasi dan di tandatangani oleh Presiden Federasi Rusia, alurnya adalah State Dumam membuat Undang-undang dan hukum lalu di kirimkan ke

---

<sup>7</sup> Yustiningrum. E, "Partai Politik, Pemilu, dan Pemerintahan Rusia", Jurnal Politik, Volume 1 No.1, Januari 2004, hlm. 4

Dewan Federasi, setelah itu Dewan Federasi akan menyetujuinya atau tidak jika Dewan Federasi menyetujuinya maka Dewan Federasi akan mengirimkannya kepada Presiden untuk di tandtangani, setelah Presiden memberikan tanda tanganya maka Undang-undang dan hukum itu sah digunakan di Negara Federasi Rusia.

Ada beberapa wewenang State Duma berdasarkan Konstitusi Rusia tertuang dalam Bab 5 mengenai Majelis Federal dalam Pasal 103.<sup>8</sup> Berikut ini isi dari pasal 103 tersebut.

#### 1. Kewenangan dari State Duma

- a) Menyetujui pengangkatan Kepala Pemerintah Federasi Rusia oleh Presiden Federasi Rusia.
- b) Memutuskan masalah kepercayaan Pemerintah Federasi Rusia.
- c) Mendengar laporan tahunan dari Pemerintah Federasi Rusia pada hasil kerja, termasuk isu-isu yang diangkat oleh State Duma.
- d) Mengangkat dan memberhentikan Ketua Bank Central Federasi Rusia.
- e) Mengangkat dan memberhentikan Ketua dan separuh dari para auditor dari Kamar Akutansi.
- f) Memproklamasikan pemberian amnesti
- g) Mempercepat dakwaan terhadap Presiden Federasi Rusia untuk tuduhnya.

---

<sup>8</sup> “The Constitution of the Russian Federation”, di akses dari <http://www.constitution.ru/en/10003000-06.htm>, pada tanggal 15 Januari 2017 pukul 15:53

State Duma akan mengambil keputusan pada isu-isu sebagaimana yang telah dimaksud kewenangannya oleh Konstitusi Federasi Rusia. Resolusi dari State Duma harus di adposi oleh mayoritas jumlah deputi State Duma, jika aturan lain untuk mengadopsi keputusan tidak diatur oleh konstitusi Federasi Rusia.

## **2. Dewan Federasi**

Dewan Federasi adalah salah satu bagian dari parlemen Rusia, State Duma adalah majelis rendah sedangkan Dewan Federasi sendiri adalah majelis tinggi dalam Parlemen di Rusia. Dewan Federasi memiliki 170 anggota di dalamnya dan anggotanya di kenal sebagai senator, pusat dari Dewan Federasi berada di ibu kota Rusia yaitu di Moscow.<sup>9</sup>

Anggota Dewan Federasi sendiri di pilih oleh presiden namun presiden tidak dapat membubarkan begitu saja majelis ini, dalam Dewan Federasi tidak terdapat faksi-faksi politik, Dewan Federasi sendiri tidak dipilih langsung seperti State Duma namun di pilih oleh pejabat daerah, Dewan Federasi terdiri dari dua perwakilan dari masing-masing subjek federal Rusia, satu senator di pilih oleh parlemen daerah, sedangkan yang lainnya di pilih oleh pemimpin daerah.<sup>10</sup>

Dewan Federasi bekerja bersama State Duma untuk merancang Undang-undang dan mengesahkannya agar menjadi undang-undang yang legal untuk dipakai di

---

<sup>9</sup> “A Short Guide To The Russian Political System”, di akses dari <http://www.rogerdarlington.me.uk/Russianpoliticalsystem.html>, pada tanggal 15 Januari 2017 pukul 16:34

<sup>10</sup> “Basic Fact About Russia : Political System” di akses dari <http://russiapedia.rt.com/basic-facts-about-russia/political-system/>, pada tanggal 15 Januari 2017 pada Pukul 16.40

Negara Rusia, Dewan Federasi wajib mempertimbangkan berbagai hukum federal yang mencakup isu-isu tentang keuangan, keamanan, pertahanan Negara, pajak, dan juga berbagai ratifikasi yang telah di buat oleh State Duma.

Ada beberapa kewenangan yang di miliki oleh Dewan Federasi dalam sistem pemerintahan di Rusia, hal tersebut tertuang dalam konstitusi pasal 102 tentang Majelis Federal.<sup>11</sup> kewenangan tersebut adalah :

1. Menyetujui perubahan batas antara subjek Federasi Rusia.
2. Menyetujui keputusan Presiden Federasi Rusia mengenai sosialisasi Negara dalam keadaan darurat militer.
3. Memutuskan penggunaan angkatan bersenjata Federasi Rusia di luar wilayah Federasi Rusia.
4. Pengangkatan pemilihan Presiden Federasi Rusia.
5. Menunjuk hakim Mahkamah Konstitusi Federasi Rusia, Mahkamah Agung Federasi Rusia, dari pengadilan tinggi Arbitrase Federasi Rusia.
6. Mengangkat dan memberhentikan Prokurator Jenderal Federasi Rusia.
7. Mengangkat dan memberhentikan wakil ketua dan separuh auditor semua Akuntansi Chamber.

---

<sup>11</sup> “The Constitution of the Russian Federation”, di akses dari <http://www.constitution.ru/en/10003000-06.htm>, pada tanggal 15 Januari 2017 pukul 16:55



Selain itu Dewan Federasi Rusia akan mengambil keputusan pada isu-isu sebagaimana yang telah dimaksud kewenangannya oleh Konstitusi Federasi Rusia. Resolusi Dewan Federasi harus diadopsi oleh mayoritas dari jumlah anggota Dewan Federasi.

## **B. Politik Luar Negeri Rusia**

Rusia adalah Negara yang mewarisi banyak hal dari Uni Soviet setelah runtuhnya Uni Soviet pasca berakhirnya perang dingin tahun 1990 silam, setelahnya politik di Rusia mengalami banyak perubahan, pada saat para pemimpin Uni Soviet masih berkuasa ideologi Negara tersebut adalah Komunis namun setelah bergantinya pemimpin Uni Soviet terakhir yaitu Michael Gorbachev kepada pemimpin atau presiden pertama Rusia Boris Yeltsin maka berakhirilah masa komunisme dan berganti menjadi bentuk pemerintahan Republik.

Pada masa kepemimpinan Boris Yeltsin dari tahun 1991 hingga 1999 politik luar negeri Rusia cenderung pro terhadap barat, tujuan utama politik luar negeri Boris Yeltsin adalah untuk pembangunan politik dan ekonomi dalam negeri Rusia.<sup>12</sup> pada masa kepemimpinan Boris Yeltsin Rusia masih dalam proses mencari jati diri pasca menjadi pewaris Uni Soviet, Rusia pada masa itu masih belum memiliki identitas yang jelas karena harus menggantikan ideologi komunis pasca runtuhnya Uni Soviet, pada saat itu barat adalah sekutu politik Rusia karena pada saat itu Rusia berada dalam tahap

---

<sup>12</sup> “Boris Yeltsin Foreign Policy Legacy”, di akses dari <http://www.personal.utulsa.edu/~robert-donaldson/yeltsin.htm>, pada 17 Januari 2017 pukul 11.35

pembangunan ekonomi dan politiknya dari awal pasca terpisahnya mereka dari Uni Soviet dan mereka menjadikan barat sebagai sumber potensial untuk peminjaman dana untuk reformasi ekonomi Rusia. Boris Yeltsin juga harus menjaga kekuatan sebagai Negara besar yang di wariskan oleh Uni Soviet, salah satunya adalah kursi tetap di Dewan Keamanan PBB.<sup>13</sup>

Boris Yeltsin sendiri adalah presiden pertama Rusia yang di pilih secara langsung, Boris Yeltsin menjadi presiden tanpa memiliki partai politik karena Boris Yeltsin terpilih sebagai presiden atas dasar kekaguman rakyat Rusia akan jasanya dalam kudeta pemerintahan Komunisme dan rakyat Rusia pada saat itu menganggap Boris sebagai pahlawan Rusia.

Pada saat masa kemimpinanya banyak anggota State Duma yang tidak sejalan denganya karena banyak keputusan Boris Yeltsin yang kontroversial, tak hanya itu karena sebagian besar anggota State Duma pada saat itu adalah dari partai Komunis Rusia dan Boris sendiri menjabat presiden tanpa memiliki partai politik sehingga banyak yang menganggap Boris memiliki pandangan politik dan ideologi yang berbeda.

Politik luar negeri Rusia era Yeltsin merefleksikan kepentingan nasional yang tidak selalu terbatas dengan jelas. Rusia berusaha menyeimbangkan posisinya dengan

---

<sup>13</sup> Bobo Lo, *Russian Foreign Policy in The Post Soviet Era*, Palgrave Macmillan, New York, 2002, hlm.13

Barat dengan melakukan berbagai macam kerjasama dengan tujuan untuk menghadapi ketidakstabilan di wilayah perbatasan Rusia.<sup>14</sup>

Setelah turunya Boris Yeltsin sebagai Presiden Rusia, pada tahun 2000 terpilihlah presiden baru yaitu Vladimir Putin, rakyat Rusia sadar betul bahwa Putin memiliki sifat yang jauh berbeda dengan Yeltsin, Putin lebih memiliki sifat yang berani, tangguh, dan tentunya tidak pro terhadap barat, meski tidak pro terhadap barat namun bukan berarti Putin anti barat, Putin tetap menjadikan barat sebagai sumber kerjasama dalam bidang teknologi dan pengetahuan. Vladimir Putin dianggap sebagai sosok yang tepat untuk memperbaiki keadaan di Rusia dan mengembalikan Negara tersebut menjadi negara yang kuat.

Tujuan utama politik luar negeri yang di rencanakan Putin sudah sangat jelas, bagi Putin pragmatisme, efektivitas ekonomi, dan kepentingan nasional adalah tujuan utama bagi dirinya dalam membuat kebijakan luar negeri bagi Rusia. Sebagai pewaris terbesar kejayaan Uni Soviet, Putin juga ingin mengembalikan kejayaan tersebut dalam tubuh Federasi Rusia, menjadi negara yang memiliki kekuatan besar (*great power*) di jadikan oleh Putin sebagai kebijakan strategis Rusia, salah satunya adalah dengan menekankan bahwa dunia harus tetap berbentuk multipolar dan menjadikan Rusia sebagai salah satu kekuatan besar di dunia.

---

<sup>14</sup> Muhammad Ali Busthomi, "Negara Federasi Rusia : Politik Luar Negeri dan Tingkat Pertumbuhan Ekonomi Rusia " melalui Diplomasi Energi Rusia, FISIP UI, 2010

Dalam konteks reformasi politik, kepemimpinan Putin sebagai presiden juga mendapat dukungan mayoritas dari anggota State Duma, sehingga dapat menjalankan roda kepemimpinannya menjadi lebih baik, hal ini jauh berbeda dari presiden sebelumnya yang kurang mendapat dukungan penuh dari State Duma, sehingga dalam prakteknya seringkali terjadi perbedaan pendapat dan pandangan hingga benturan-benturan kepentingan.<sup>15</sup>

Vladimir Putin langsung bergerak cepat memperbaiki keadaan di Rusia setelah terpilihnya dirinya sebagai presiden di Rusia, hal pertama yang dilakukan Putin adalah mengurangi ketergantungan negaranya terhadap bantuan ekonomi dari asing dan terutama dari barat. Tujuan utama Putin dalam menjalankan politik luar negerinya adalah untuk menegaskan bahwa Rusia adalah salah satu negara super power di dunia.

Saat berkampanye pada tahun 2000 Vladimir Putin melontarkan slogan “Rusia Raya”, salah satu karakter dari Rusia raya adalah menegaskan karakter non-isolasionisme terhadap kebijakan luar negerinya. Rusia di bawah Vladimir Putin menunjukkan karakternya itu dengan berpartisipasi pada 260 negara dalam pertemuan internasional di tingkat pejabat. Presiden Vladimir Putin juga mengorientasikan kebijakan luar negerinya terhadap Eropa.<sup>16</sup>

Pada tahun 2008 Vladimir Putin mengundurkan diri sebagai presiden dan digantikan orang terdekatnya yaitu Dmitry Medvedev, Medvedev memiliki pandangan

---

<sup>15</sup> Andi Rafael Saputra, *Dari Uni Soviet Hingga Rusia*, Palapa, Yogyakarta, 2014, hlm. 117.

<sup>16</sup> Ibid

politik yang tidak jauh berbeda dengan Vladimir Putin karena mereka masih berasal dari satu partai yang sama yaitu partai United Russia, prioritas dari kebijakan luar negeri yang di ambil Medvedev juga tak jauh berbeda dengan apa yang di ambil Vladimir Putin, prioritas kebijakan luar negeri yang di ambil Medvedev adalah integrasi Rusia dalam komunitas internasional dan menyamakan kedudukan dengan Uni Eropa, NATO, dan juga Hegemoni Barat dengan tujuan untuk tercapainya kepentingan nasional Rusia.

Dmitry Medvedev juga ingin Rusia selalu ikut serta dalam kegiatan ekonomi internasional, sebagai salah satu bentuk memperkuat perekonomian dalam negeri Rusia itu sendiri, seperti Vladimir Putin, Medvedev juga tidak menerima dunia dalam sistem Multipolar karena dia beranggapan dunia tidak bisa terpusat kepada satu negara dan satu negara besar tidak dapat membuat peraturan yang harus di turuti seluruh dunia tanpa ada negara lain yang mensetujuinya, sehingga Medvedev juga ingin membuat Rusia menjadi salah satu kekuatan besar di dunia yang sanggup menandingi kekuatan Amerika Serikat.

Kebijakan luar negeri yang di ambil oleh Medvedev tercermin dalam dokumen kebijakan luar negeri yang di keluarkan oleh pemerintah Rusia pada Juli 2008, Medvedev juga berpikir panjang tentang strategi keamanan Rusia, dia membuat kebijakan untuk membangun keamanan Rusia agar menjadi lebih kuat hingga tahun 2020. Dokumen-dokumen yang di buat tersebut menggantikan dokumen lama yang sebelumnya di gunakan pada masa pemerintahan Vladimir Putin, Moskow juga akan

membangun kerjasama internasional dan berperan dalam tatanan dunia dengan mengikuti hukum internasional dan dewan keamanan.

### **C. Politik Luar Negeri Rusia Terhadap Timur Tengah**

Tidak dapat dipungkiri bahwa Timur Tengah adalah salah satu kawasan yang sangat rawan dengan terjadinya konflik, ada berbagai alasan mengapa kawasan di Timur Tengah sangat rawan dengan terjadinya konflik, dan salah satu yang sangat mencolok adalah karena sumber daya alam yang ada di kawasan Timur Tengah yaitu Minyak.

Harlford Mackinder mengklasifikasikan daerah Timur Tengah sebagai *Heartland* atau *World Island*, *Heartland* berarti kawasan yang mempunyai kandungan sumber daya mineral yang jumlahnya tidak tertandingi oleh belahan dunia manapun. Ahli geopolitik AS juga memiliki pandangan yang sama dengan Harlford, kedua tokoh tersebut berpandangan siapapun yang menguasai *World Island* akan dapat mengendalikan dunia.<sup>17</sup>

Banyak negara yang ingin menyebarkan pengaruhnya di Timur Tengah agar dapat menguasai sumber daya alam di kawasan tersebut , dan salah satunya adalah Rusia. Rusia memiliki kebijakan luar negeri terhadap Timur Tengah, kebijakan tersebut terbagi menjadi dua komponen, yaitu Iran dan daerah di Timur Tengah lainnya, di Iran pemerintah Rusia mengejar kerjasam dalam bidang energi dan juga ekonomi. Di saat yang bersamaan Moskow berusaha untuk memainkan peran global dengan

---

<sup>17</sup> Sidik Jatmika, Pengantar Studi Kawasan Timur Tengah, Maharsa, Yogyakarta, 2014, hlm. 16

mendukung pembuatan senjata Nuklir di Iran, dengan adanya isu nuklir tersebut membuat Iran menjadi salah satu aktor penting di Timur Tengah dan juga dunia. Di wilayah lain di Timur Tengah kebijakan yang di ambil Rusia lebih di karenakan *prestige* atau gengsi, dengan itu semua mendorong Rusia untuk selalu terlibat dalam isu-isu global yang berada di Timur Tengah seperti konflik Palestina dan Israel, selain itu Rusia juga ingin mempertahankan komunikasi dengan negara di Timur Tengah yang telah lama menjadi sekutunya yaitu Suriah.

Rusia ingin menjadi aktor yang berpengaruh di kawasan Timur Tengah selain dengan alasan untuk kesetabilan dan juga perdagangan, kebijakan luar negeri Rusia terhadap Timur Tengah dilandasi atas keinginan Rusia sebagai negara besar yang harus berperan aktif dalam daerah yang penting seperti Timur Tengah, Rusia meyakini dengan seringnya terjadi konflik di Timur Tengah, Rusia harus membangun hubungan perdangan dan hubungan yang saling menguntungkan dengan negara-negara yang berada di Timur Tengah.

Kebijakan luar negeri Moscow terhadap Timur Tengah sebenarnya berada di belakang prioritas kebijakan luar negeri Rusia terhadap Amerika, Eropa, China, dan juga Asia, namun Timur Tengah tidak dapat di abaikan begitu saja oleh Rusia karena merupakan salah satu daerah yang letak geografisnya sangat dekat dengan Rusia. Penarikan diri Moskow terhadap Timur Tengah di bawah kepemimpinan Mikhail Gorbachev pada masa awal perang teluk pertama menandai penurunan status Rusia sebagai negara adidaya. Kemunculan Rusia sebagai pemain di Timur Tengah di bawah

kepemimpinan presiden Vladimir Putin bertujuan untuk memulihkan posisi Rusia sebagai negara adidaya di Timur Tengah.<sup>18</sup>

Sistem Multipolar adalah salah satu tujuan utama politik luar negeri Rusia, untuk mencapai hal tersebut salah satu hal yang harus dilakukan Rusia adalah melakukan hubungan baik dan kerjasama dengan Timur Tengah, selain itu Rusia juga ingin mendapatkan pengaruh politiknya kembali setelah runtuhnya Uni Soviet, fokus pada Timur Tengah terlihat dalam kunjungan Vladimir Putin ke Timur Tengah pada tahun 2005 setelah semenjak kepemimpinan Nikita Khrushchev pada tahun 1964 yang menjadi pemimpin Rusia terakhir yang berkunjung ke Timur Tengah.<sup>19</sup>

Pada Januari 2000 untuk memperkuat posisi Rusia di Timur Tengah dan juga terutama memperkuat ekonominya, Rusia memperkuat hubungan dengan Iran dengan cara dukungan yang kuat terhadap program nuklir Iran, selain Iran Rusia juga memberikan ampunan hutang sebesar \$13 juta dollar kepada Suriah. Dalam tata-tatanan dunia yang berbentuk multipolar, Rusia sadar semakin pentingnya hubungan dengan negara-negara seperti Turki, Iran, dan Arab Saudi. Moskow takut perkembangan militer Amerika Serikat di Timur Tengah akan mengancam keamanan Rusia.

---

<sup>18</sup> "Russia in the Middle East: Moscow's Objectives, Priorities, and Policy Drivers", di akses dari <http://carnegie.ru/2016/04/05/russia-in-middle-east-moscow-s-objectives-priorities-and-policy-drivers-pub-63244>, pada 25 Januari 2017 pukul 23.35

<sup>19</sup> Moldavsky.B, "Russian Foreign Policy in the Middle East: No change in the offing", Strategic Assessment, Volume 15, No. 4, January 2013, hlm.121



Ada beberapa tujuan lain Rusia dalam politik luar negerinya di Timur Tengah selain ingin memiliki pengaruh yang besar di wilayah tersebut, dan di antaranya adalah sebagai berikut.<sup>20</sup>

1. Membendung dan mengurangi ekstrimisme Islam di Timur Tengah, Rusia takut radikalisme Islam dapat menyebar ke negaranya dan menyebabkan ketidakstabilan di dalam negeri Rusia, seperti yang terjadi di Kaukasus Selatan dan pemberontakan separatist Chechnya
2. Mendukung Rezim yang kuat dan anti kekerasan untuk membangun aliansi geopolitik dengan mereka.
3. Membuat pangkalan militer dan menempatkan militer Rusia di kawasan tersebut.
4. Memperluas jangkauan Rusia dalam pasar minyak, gas, dan juga Nuklir.
5. Menarik investasi dari negara-negara kaya di teluk masuk ke dalam negeri Rusia.

Tentu Rusia akan melakukan segala cara untuk mempertahankan pengaruhnya di Timur Tengah, dan tetap menjaga persaingan memperluas hegemoni dengan Amerika Serikat karena Rusia tidak akan pernah membiarkan Amerika Serikat memiliki pengaruh sendiri dalam politik di Kawasan Timur Tengah.

Rusia juga memiliki kepentingan yang lain selain memperluas pengaruhnya di Timur Tengah, dan salah satunya adalah dari sektor ekonomi. Rusia sebagai salah satu negara dengan hasil produksi energi terbesar di dunia melihat minyak dan gas sebagai sumber ekonomi yang dapat di jadikan bahan kerjasama dengan negara-negara di

---

<sup>20</sup> Ibid.

Timur Tengah, perusahaan-perusahaan Rusia seperti Gasporm juga memiliki banyak kerjasama dengan negara-negara di Timur Tengah seperti Irak, Iran, Arab Saudi, Libya, dan juga Aljazair. Beberapa negara di Timur Tengah juga termasuk di antara beberapa konsumen tetap teknologi yang di buat oleh Rusia, selain teknologi negara seperti Iran, Suriah, dan Aljazair juga sering membeli senjata dari Rusia.<sup>21</sup>

#### **D. Politik Luar Negeri Rusia Terhadap Suriah**

Moskow dan Damaskus telah menjadi teman dekat semenjak tahun 1960, selama perang dingin dari tahun 1963 hingga 1991 tidak kurang dari 50.000 pelajar Suriah berkuliah di beberapa perguruan tinggi ternama di Rusia seperti Moscow State University dan People's Friendship University.<sup>22</sup> Moskow menjadikan Suriah sebagai pusat untuk menyebarkan pengaruhnya di Timur Tengah selama perang dingin berlangsung, seperti di ketahui perang dingin adalah dimana blok barat yang di pimpin oleh Amerika Serikat dan blok timur yang di pimpin oleh Uni Soviet berlomba untuk menyebarkan ideologi dan pengaruhnya di seluruh dunia.

Di bawah kepemimpinan Boris Yeltsin pasca runtuhnya Uni Soviet pada tahun 1991 Suriah tidak lagi menjadi prioritas kebijakan luar negeri Rusia, namun di pertengahan tahun 1990 Suriah mulai memproduksi sendiri senjata kimia dan beberapa laporan mengatakan Moskow terlibat dalam pembuatan senjata kimia tersebut, hal tersebut tercermin ketika Yevgeny Primakov yang saat itu menjabat sebagai kepala

---

<sup>21</sup> Dmitry Trenin, *Russia's Policy in the Middle East : Prospect for Consensus and Conflict with the USA*, The Century Foundation, New York, 2005, hlm. 6

<sup>22</sup> Anna Borshcevskaia, *Russia in the Middle East : Motives, Consequences, Prospects*, The Washington Institute for Near East Policy, Washington DC, 2016, hlm.36

Intelejen Luar Negeri Rusia pada tahun 1996 memperkuat hubungan dengan Suriah untuk memulai usahanya dalam meraih pengaruhnya kembali di Timur Tengah.

Pada awal tahun 2000 pemimpin Suriah Hafiz Al-Assad berkunjung ke Rusia untuk membahas hutang Suriah terhadap Rusia di era Soviet yang memiliki jumlah tidak kurang dari \$12 Miliar, hampir saja Moskow membekukan hubungan dengan Damaskus namun ada beberapa kepentingan Moskow di Suriah yang di bahayakan jika Moskow membekukan hubungan kedua negara, salah satunya adalah dimana salah satu pantai Suriah di kota Tartus adalah satu-satunya pangkalan Angkatan Militer yang di punyai Rusia di daerah Mediterania, selain itu Damaskus juga siap untuk membayar dana segar sebesar \$2 Miliar untuk menggantikan senjata lama buatan Soviet dengan senjata baru buatan Rusia termasuk misil pertahanan udara.

Kebijakan luar negeri Rusia terhadap Suriah juga tidak jauh dengan ingin di bentuknya sistem Multipolar oleh Rusia dan melawan Hegemoni Amerika di Timur Tengah dan juga Dunia. Pada tahun 2002-2003 Rusia dan Suriah menentang upaya Amerika untuk mendapat dukungan dari Dewan Keamanan untuk aksi Intervensi Amerika terhadap Irak, Rusia beranggapan bahwa Suriah adalah tempat berikutnya yang akan di Intervensi oleh Amerika dan sekutu, namun Rusia telah mengatakan mereka akan melakukan apapun untuk melindungi kedaulatan Suriah.<sup>23</sup>

Untuk mempererat hubungan Rusia dan Suriah, pada tahun 2005 Presiden Bashar Al-Assad mengunjungi Moskow, dan dari hasil pertemuan tersebut, Putin

---

<sup>23</sup> Mark Kaltz, "Putin's Foreign Policy Toward Syria", Middle East Review of International Affairs, Volume. 10, No. 1, Maret 2006, hlm. 36

membuat kebijakan akan mengampuni 75% hutang Suriah terhadap Rusia, dan sisanya akan dibayar selama 10 tahun ke depan dari tahun 2005. Dalam pertemuan Bashar dan Putin pada tahun 2005, Russia juga setuju untuk menjual misil pertahanan udara dan darat terhadap Suriah, sebagai gantinya pada Maret 2005 perusahaan minyak terbesar Rusia yaitu Tatneft menandatangani kesepakatan dengan Suriah atas di izinkanya Tatneft mengambil minyak dan gas di wilayah Suriah.<sup>24</sup>

Sehingga untuk beberapa alasan seperti politik, keamanan, dan ekonomi, Rusia memiliki kebijakan luar negeri khusus terhadap Suriah, dari mulai mendukung penuh rezim Al-Assad, pengiriman bantuan senjata militer terhadap militer Suriah, dan menjaga Negara tersebut dari segala ancaman yang mereka dapatkan.

---

<sup>24</sup> Ibid